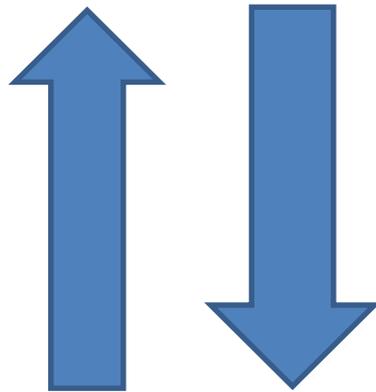


**2023**

**BAPPEDALITBANG**

**PEMERINTAH KOTA  
SAMARINDA**



**LAPORAN SINERGITAS DAN HARMONISASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA URUSAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.....	6
BAB III CAPAIAN KINERJA PERENCANAAN .....	33
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	46

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Alloh SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada kita semua , sehingga penyusunan laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Manusia Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam Penyusunan laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Manusia Tahun 2023, menggunakan dan mengolah data serta informasi yang bersumber dari beberapa SKPD serta lembaga / organisasi di Pemerintahan Kota Samarinda.

Semoga laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Manusia Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi kita semua , baik untuk Perencanaan , penempatan , evaluasi khususnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Samarinda, Desember 2023

Sub Kesejahteraan Masyarakat

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional ; proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, menentukan pilihan tindakan prioritas yang tepat untuk masa akan datang dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2004, rencana pembangunan nasional meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pendekatan teknokratis, 2) Pendekatan partisipatif, 3) Pendekatan politis, serta 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah atas (*top down* dan *bottom up*). Selain itu, perlu mengusung prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam keterpaduan

pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan wilayah.

Tematik adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Sedangkan holistik adalah penjabaran tematik program kepala daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Sedangkan spasial adalah penjabaran program kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreatifitas.

Sinergitas berasal dari kata Sinergi Mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dpt menghasilkan produk lebih baik atau lebih besar dibandingkan jika dikerjakan sendiri sendiri. sinergisitas/sinergisme/sinergitas adalah kegiatan gabungan atau kerjasama yg dilakukan oleh beberapa unsur guna mendapatkan hasil yg lebih baik dan lebih maksimal. Sinergisitas tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja melainkan dengan dua atau lebih, bisa puluhan bahkan ratusan orang sesuai kebutuhan.

Sedangkan harmonisasi merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk mencari kesesuaian atau keselarasan pada Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun. Harmonisasi bertujuan agar Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan rasa perlindungan terhadap target peraturan tersebut.

Harmonisasi juga dimaksudkan untuk mengurangi tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan teleologi hukum harmonisasi, tujuannya adalah meminimalkan egosektoral, menguatkan koordinasi dan kebersamaan, mencegah deharmonisasi, dan meningkatkan kualitas perundang-undangan yang akan dihasilkan. Untuk itu, dalam metode harmonisasi ini harus dilakukan dengan menyelaraskan dengan Pancasila, UUD 1945, perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat dengan norma yang akan disusun, sehingga sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan merupakan kolaborasi antar berbagai sektor dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan harmonisasi, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan sinergitas lintas kabupaten/kota juga perlu dilakukan.

Sinergitas pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini penting dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dll. Dengan meningkatkan pembangunan. Implementasi adalah kebiasaan atau strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan diharapkan mampu untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pembangunan harus dilaksanakan di segala bidang secara menyeluruh.

Pembangunan melalui peningkatan peran dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, kependudukan, pemberdayaan, kesehatan, bencana, keluarga yang akan diselaraskan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan dalam RPJMD 2021-2026.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Tujuan disusunnya Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Manusia Urusan Kesejahteraan Sosial, adalah untuk :

1. Memberikan Gambaran tentang kondisi umum kesejahteraan sosial Kota Samarinda.
2. Melakukan analisis pencapaian Pembangunan terkait dengan tingkat kesejahteraan sosial di Kota Samarinda.

## **1.3. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

BAB III : Capaian Kinerja Perencanaan

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

## BAB 2

### SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### 2.1. Visi Misi Kota Samarinda

Berpedoman pada arah pembangunan kota samarinda sebagaimana termuat dalam RPJPD kota samarinda 2005-2025, yang mana Visi pembangunan kota samarinda yang ingin diwujudkan dalam RPJPD 2005-2025 adalah: **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN “**

Dalam pencapaian visi tersebut akan dijabarkan dalam RPJMD yang mana pada tahun ini memasuki periode RPJMD tahun 2021-2026 yakni dengan Visi **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

Adapun Misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya;
- (2) Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
- (3) Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat ;
- (4) Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
- (5) Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya Masyarakat Kota Samarinda yang religious taat serta patuh dalam menjalankan agama yang baik. Masyarakat yang unggul dimana mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas melalui pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Diharap dengan SDM unggul dapat menjadi penentu kemajuan ekonomi, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. Masyarakat

yang berbudaya memiliki semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi. Misi 1 ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing. Kota Samarinda akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga, meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender, meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal. Program Unggulan (PU) dalam misi pertama yang dirumuskan adalah PU 1 Program Pemberdayaan RT (Alokasi Rp 100 juta – Rp 300 juta) per RT per tahun); PU 4 Program Social Security Number (satu kartu untuk semua layanan); PU5 Program Smart City plus; PU6 Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita; PU 7 V-5 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun .

Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan Misi 2 ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi juga untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Dalam mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan Kota Samarinda akan berupaya meningkatkan pembangunan sektor tersier, meningkatkan kewirausahaan baru, meningkatkan jumlah dan nilai investasi, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Program Unggulan yang dirumuskan adalah PU 1 Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun); PU 4 Program social security number (satu kartu untuk semua layanan); PU 8 Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan) ;PU 10 Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (star up).

Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi Misi 3 mempunyai tujuan menciptakan tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif dan efektif. Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dapat terwujud dengan meningkatkan sistem pelayanan publik, reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dan meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan karakter kebangsaan. Dengan program unggulan PU 4 Program social security number dan PU 5 Program smart city plus.

Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern

Misi 4 bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi. Infrastruktur yang mantap dan modern akan diwujudkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana jalan serta jembatan yang mantap. Didukung juga dengan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai. Dan yang menjadi impian Kota Samarinda dapat mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi kereta api. Dengan Program Unggulan PU 2 Program Pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern dan PU 3 Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari Adapun tujuan dari misi 5 yaitu mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Sebuah kota yang baik harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga atau penduduk yang tinggal didalamnya. Kota Samarinda akan mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari untuk dijadikan tempat hunian dan sebagai persiapan daerah penyangga IKN. Strategistrategi akan dilaksanakan untuk meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas, meningkatkan kebersihan,

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim, meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni serta mengintegrasikan sarana prasarana sumber daya air. Dengan Program Unggulan PU 2 Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern; PU 5 Program Smart City Plus dan PU 9 Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground. Selanjutnya sebagai perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 akan ditetapkan dengan dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja yang terukur ini juga sekaligus menjadi titik tolak berhasil atau tidaknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda selama masa jabatan berlangsung.

Pada Bab ini akan dilakukan sinkronisasi perencanaan bidang pembangunan manusia terhadap 6 SKPD yang berada dalam sub.bidang Kesejahteraan masyarakat Bappedalitbang Kota Samarinda.

1. Dinas Sosial
2. Dinas Kesehatan
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 **Tabel 2.1. Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Samarinda**

No	MISI/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
<b>Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya</b>		
<b>1.1</b>	<b>Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing</b>	<b>IPM</b>
1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup
1.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah
		Rata-rata lama sekolah
1.1.3	Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda

No	MISI/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.1.4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG
1.1.5	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan
<b>Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan</b>		
<b>2.1</b>	<b>Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi</b>	<b>Pertumbuhan ekonomi</b>
2.1.1	Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
2.1.2	Meningkatnya kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan
2.1.3	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Realisasi investasi

<b>No</b>	<b>MISI/Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>
2.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
2.1.5	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Skor PPH (%)
Presentase ketersediaan Energi 2.400 (kkal/kap/hr)		
Presentase ketersediaan Protein 63 (gr/kap/hr)		
<b>2.2</b>	<b>Menurunnya penduduk miskin</b>	<b>Angka kemiskinan</b>
2.2.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka PMKS
2.2.2	Meningkatnya lapangan pekerjaan	Angka Pengangguran terbuka

No	MISI/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
<b>Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi</b>		
<b>3.1</b>	<b>Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsive, efektif</b>	<b>Indeks reformasi birokrasi</b>
3.1.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik
	Meningkatnya pelayanan yang akuntabel	Nilai LPPD
3.1.3	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan
<b>Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern</b>		
<b>4.1</b>	Terwujudnya infrastruktur yang terintegrasi, strategis, dan memiliki daya ungkit dalam arah pengembangan kota	<b>Rasio konektivitas kabupaten/kota</b>

No	MISI/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
4.1.1	Mengintegrasikan sarana dan prasarana pengendalian banjir	Jumlah titik genangan banjir
4.1.2	Meningkatkan aksesibilitasinter dan antar wilayah kota	Porsi panjang jaringan jalan kondisi baik (%)
4.1.3	Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan sistem transportasi yang terpadu dan modern	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota
4.1.4	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar secara kuantitas dan kualitas	Cakupan layanan air bersih
4.1.5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Persentase Rumah Layak Huni
<b>Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari</b>		
5.1	Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan	Penghargaan Adipura

<b>No</b>	<b>MISI/Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>
5.1.1	Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas	Persentase tersedianya luasan RTH
5.1.2	Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Persentase luas kawasan perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU
5.1.3	Meningkatnya kebersihan wilayah kota	Persentase pengelolaan sampah
5.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
5.1.5	Mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah
5.1.6	Terintegrasinya sarana prasarana sumber daya air	Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang

2

## **2.2. Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SKPD dengan Visi Misi Kota Samarinda**

Berdasarkan data dari masing-masing Perangkat Daerah terpilih, akan ditinjau keselarasan Program ,kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah terhadap Visi Misi Kota Samarinda yang telah ditetapkan. Keselarasan tersebut dapat tercermin dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada program kegiatan, akan tampak apakah program tersebut mendukung Visi Misi Kota atau tidak. Perangkat Daerah yang berada dalam koordinasi Bidang Pembangunan Manusia sub Kesejahteraan Masyarakat :

1. Dinas Sosial
2. Dinas Kesehatan
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 2.2.1. Dinas Sosial

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
<b>MISI 2 :</b> <b>Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan</b>	
<b>Menurunnya penduduk miskin</b>	<b>Angka kemiskinan</b>
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka PMKS

Kemiskinan	Indikator Kemiskinan di Kota Samarinda		
	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	42.84	41.95	41.89
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4.99	4.85	4.81
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.07	0.59	0.75
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.32	0.13	0.16
Garis Kemiskinan (Rupiah)	750,055	784,198	850,842

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kota	0.00
			Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota	475,000,000
			Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1,155,420,000
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100,000,000
	Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400,000,000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	172,442,000
	Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Penyediaan Permakanan	253,432,000

		Pengemis di Luar Panti Sosial		
			Penyediaan Alat Bantu	100,000,000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10,300,000
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10,300,000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5,150,000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	95,000,000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20,600,000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	27,000,000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	135,000,000
			Penyediaan Permakanan	833,830,000

			Penyediaan Sandang	67,824,000
			Penyediaan Alat Bantu	92,700,000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	61,800,000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	30,000,000
	Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	400,000,000
			Penyediaan Sandang	200,000,000
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	200,000,000

### 2.2.2. Dinas Kesehatan

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
<b>MISI 1 : Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya</b>	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup

Indikator IPM	Indeks Pembangunan Manusia				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Umur Harapan Hidup</b>	<b>74.17</b>	<b>74.27</b>	<b>74.54</b>	<b>74,56</b>	<b>74,68</b>
Harapan Lama Sekolah	14.70	14.89	15.09	15,10	15,39
Rata-Rata Lama Sekolah	10.47	10.48	10.49	10,71	10,93
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)	14.613	-	14.582	15.162	15.610
IPM	74,27	80,11	80.76	81,43	82,32

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	11.050.000.000
2	Pengembangan Rumah Sakit	600.000.000
3	Pembangunan Puskesmas	16.247.800.000
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4.013.127.000
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.621.417.500
6	Pengadaan Obat, Vaksin	9.984.265.084
7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.683.159.592
8	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	257.500.000
9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	150.000.000
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.067.331.120

11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	148.240.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	154.878.400
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	294.164.800
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	971.589.900
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.028.042.456
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	236.840.000
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.261.796.341
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.138.477.858
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.065.892.222
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.424.810.109
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.451.479.420
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	50.000.000
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	50.000.000

24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.469.313.500
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	142.000.000
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	418.930.000
27	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.586.422.000
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100.000.000
29	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	923.425.000
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	80.080.000
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	119.500.000
32	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	25.000.000
33	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.268.851.856
34	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	47.243.505.850
35	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	785.000.000
36	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.713.629.777
37	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000

38	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	465.895.000
39	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	776.350.000
40	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	35.000.000
41	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5.500.000.000
42	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100.000.000
43	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.000.000
44	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	50.000.000
45	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	57.740.000
46	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.000.000
47	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	400.000.000
48	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.148.000

49	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	230.450.000
50	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	181.118.000
51	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	151.450.000
52	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	250.080.000
53	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	739.750.000
54	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7.344.873.713

### 2.2.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
<b>MISI 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari</b>	
Mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	200.000.000
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000
4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	590.000.000
5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.000.000.000
6	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	800.000.000
7	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100.000.000

8	Penyusunan Rencana Kontijensi	200.000.000
9	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.065.137.850

#### 2.2.4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
<b>MISI 3 :</b> <b>Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi</b>	
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	120.000.000
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	500.000.000
3	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	550.000.000
4	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	414.000.000
5	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	15.000.000

6	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	80.000.000
7	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	125.000.000
8	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	75.000.000
9	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	258.150.000
10	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.000.000
11	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	75.000.000

### 2.2.5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
<b>MISI 1 : Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya</b>	
<b>Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing</b>	<b>IPM</b>
Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Paser	66.20	65.66	65.67	64.94
Kutai Barat	61.14	60.60	65.34	66.01
Kutai Kartanegara	63.74	61.43	62.76	63.40
Kutai Timur	56.35	53.77	53.78	51.55
Berau	57.66	57.91	56.48	58.17
Penajam Paser Utara	50.36	49.75	49.85	50.58
Mahakam Ulu	80.61	80.41	80.43	81.11
Balikpapan	69.11	68.97	68.62	69.27
Samarinda	66.29	70.65	67.54	68.63
Bontang	51.99	51.97	45.67	46.12
Kalimantan Timur	65.65	65.54	66.64	66.89

<b>NO</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	274.740.000
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	450.000.000
4	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	225.000.000
5	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000
6	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	120.000.000
7	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000
8	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	73.035.500
10	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000

### 2.2.6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
<b>MISI 2 :</b> <b>Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan</b>	
<b>Menurunnya penduduk miskin</b>	<b>Angka kemiskinan</b>
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka PMKS

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
1.	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	20.000.000
2.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	420.000.000
3.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.617.000
4.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.239.400.000
5.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	40.000.000

	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
--	---	--

### BAB 3

#### CAPAIAN KINERJA PERENCANAAN

Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas Triwulan 3 pada Tahun 2023 adalah :

Misi 1: Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya

Tujuan :Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing

NO	Program	Indikator	Target	Pagu	Realisasi (%)	
					Kinerja	Keuangan
<b>Sasaran :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>						
<b>Dinas Kesehatan</b>						
<b>1</b>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0.55	125,274,988,226	0	62,340,949,253  (49.76%)
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0.58		<b>0</b>	
<b>2</b>	Program Peningkatan Kapasitas	Persentase peningkatan	40	2,123,645,000		973,915,000  (45.86%)

	Sumber Daya Manusia Kesehatan	kompetensi tenaga kesehatan				
<b>3</b>	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaannya dan keterjangkauannya	13.03	2,123,645,000		203,678,650 (40.92%)
		Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	18.31	497,716,000	100	

4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	11	425,447,680	100	680,483,804 (56.97%)
	<b>Dinas Dalduk KB</b>					
5	Program Pengendalian Penduduk	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15- 49 Tahun)	2.28	989,000,000	100	323,175,630 (32.68%)
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15- 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	22	6,607,261,000	100	1,574,499,050 (23.83%)
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalence)	67.04		100	

		Rate / mCPR)				
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.92		100	
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	17		100	

**Sasaran :Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>7</b>	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	89.83%	550,000,000	72.36	236,280,308 (42.96%)
<b>8</b>	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Indeks keluarga Tinggi	14%	130,000,000	57.14	99,124,141 (76.25%)

<b>9</b>	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data gender dan anak	79%	75,000,000	63.29	32,432,000 (43.24%)
<b>10</b>	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	0.0051	508,320,000	<b>75</b>	273,724,380 (53.85%)
<b>11</b>	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Kota Layak Anak (KLA)	700 s/d 800	573,073,000	<b>0</b>	383,769,835 (66.97%)
<b>12</b>	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Parapihak Lingkup Daerah Kab./Kota	0,157%	135,000,000	16.89	66,236,101 (49.06%)
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan						

Menurunnya kemiskinan dan pengganguran						
Meningkatnya kesejahteraan sosial						
<b>Dinsos dan Pemberdayaan Sosial</b>						
<b>13</b>	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68.00%	2,954,900,000	75	1,600,823,100 (54.18%)
<b>14</b>	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1.38%	182,750,000	<b>100</b>	133,936,937 (73.29%)
<b>15</b>	Program Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase (%) Warga Migran yang Mendapatkan Penanganan	74%	50,000,000	94.59	2,265,300 (4.53%)

<b>16</b>	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhin ya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	9.70%	1,114,075,000	84.54	466,861,300 (41.91%)
<b>17</b>	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi	91.43%	1,600,320,000	69.45	44,814,106 (2.8%)

		kebutuhan dasarnya				
Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi						
Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsive, efektif						
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat						
<b>18</b>	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat (DINSOS)	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	98.49%	1,525,000,000	70.26	547,584,002 (35.91%)
<b>19</b>	Program Pendaftaran Penduduk (CAPILDUK)	Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	96.50%			
		Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang	40.00%	1,625,000,000	0	455,440,000 (73.46%)

		Memiliki KIA				
<b>20</b>	Program Pencatatan Sipil (CAPILDUK)	Presentase Kepemilikan Akte Penduduk Kota Samarinda	65.00%	575,000,000	0	488,868,800 (85.02%)
<b>21</b>	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (CAPILDUK)	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda	65.00%	505,000,000	0	225,529,000 (44.66%)
<b>22</b>	Program Pengelolaan Profil Kependudukan (CAPILDUK)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Dokumen	75,000,000	0	13,000,000 (17.33%)
<b>23</b>	Program Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan (CAPILDUK)	Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web	67.70%	220,000,000	97.64	105,852,900 (48.11%)

Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan						
Mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim						
<b>24</b>	Program Penanggulangan Bencana (BPBD)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38.01%	7,209,854,930	47.36	5,149,999,135 (71.43%)
<b>25</b>	Program penanganan bencana (DINSOS)	Persentase korban becanan alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	503,000,000	100	364,419,800 (72.45%)

Capaian rata-rata kinerja indikator program dalam pencapaian visi misi yang ada dibawah koordinasi urusan Kesmas 6 OPD adalah sekitar 68% hal ini dikarenakan masih terdapatnya data yang yang di entri dan masih berjalan ke semester 2 pelaksanaan hasil pencapaian sepanjang tahun 2023.

RPJMD PERUBAHAN 2021-2026

VISI "TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"

Misi 1 Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya

Tujuan :Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing

Indikator Tujuan: IPM

Target RPJMD	2023	2024	2025	2026
IPM	82,14	82,77	83,40	83.97

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	2021	2022	2023
Paser	72.93	73.44	74.14
Kutai Barat	72.07	72.92	73.72
Kutai Kartanegara	74.06	74.67	75.30
Kutai Timur	73.81	74.35	74.98
Berau	75.20	75.74	76.21
Penajam Paser Utara	72.01	72.55	73.30
Mahakam Ulu	67.95	68.75	69.59
Balikpapan	80.71	81.13	81.66
Samarinda	80.76	81.43	82.32
Bontang	80.59	80.94	81.56
Kalimantan Timur	76.88	77.44	78.20

Sumber data : BPS Kaltim

Target RPJMD pencapaian IPM tahun 2023 tercapai dengan persentase sebesar 82.32 %.

Misi 2 :Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan

Tujuan 2 : Menurunnya kemiskinan dan pengangguran

Indikator : Tingkat kemiskinan

<b>Target RPJMD</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Tingkat kemiskinan	4,68	4,50	4,36	4,21

Kemiskinan	Indikator Kemiskinan di Kota Samarinda		
	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	42.84	41.95	41.89
<b>Persentase Penduduk Miskin (P0)</b>	<b>4.99</b>	<b>4.85</b>	<b>4.81</b>
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.07	0.59	0.75
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.32	0.13	0.16

Sumber data : BPS Kaltim

Target RPJMD pencapaian IPM tahun 2023 belum tercapai dengan persentase sebesar 4.81 %

Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Tujuan : Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan

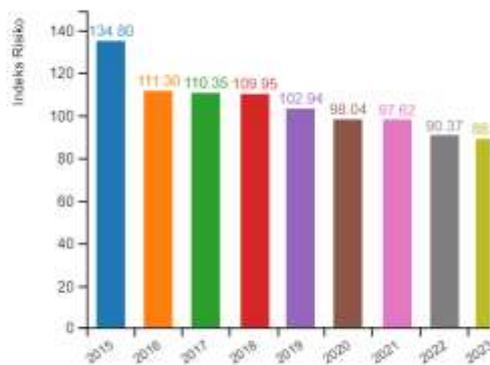
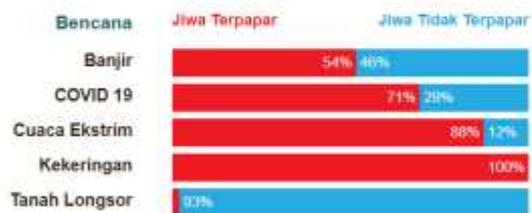
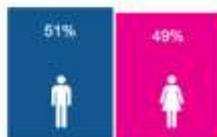
Indikator Tujuan 2 : Indeks Resiko Bencana

Kategori Tujuan	Formulasi	Target Tahun							Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	
		Awal Tahun		Target Tahun								Akhir Tahun
		2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Nilai Bencana	E = Ha V / C R = Risiko H = Hazard / Substansi / Vulnerability / Kerentanan C = Capacity /	101,85	92,77	88,03	83,00	81,85	81,00	81,00	Mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim	Indeks ketahanan daerah	Nika	

Target tercapai sesuai dengan dokumen Renstra 2023

## Kota Samarinda

Total Populasi  
**825.494**  
Jiwa



## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia sangat membutuhkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah maupun non pemerintah, sejak langkah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasinya. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan pencapaian atas apa yang direncanakan maka sinkronisasi dalam kebijakan program kegiatan harus dilakukan antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan harus memiliki komitmen untuk dapat tercapainya harapan tersebut.

Sinergitas informasi perencanaan bidang pembangunan manusia merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mendukung visi-misi dalam RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 dengan mengacu dan memperhatikan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

## **4.2. Saran**

Untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berbasis pada potensi yang dimiliki tanpa meninggalkan amanat regulasi dan kebijakan tingkat pemerintahan di atasnya, maka perlu dilakukan pengayaan dalam perencanaan, penetapan indikator kinerja serta langkah langkah strategis dalam mewujudkannya dengan memperhatikan apakah sebuah program dan kegiatan mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian target perencanaan yang telah ditetapkan sehingga kita dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas berdasarkan skala prioritas program kegiatan perencanaan yang telah ditetapkan beserta target yang akan dicapai pada periode tahun yang direncanakan.